

**KERUSUHAN PASAR GLODOK: STUDI KASUS ETNIS TIONGHOA DI
KELURAHAN GLODOK KECAMATAN TAMAN SARI JAKARTA BARAT)**
*GLODOK'S MARKET RIOT: CASE STUDIES OF ETHNIC TIONGHOA AT SUB-
DISTRICT GLODOK DISTRICT TAMAN SARI JAKARTA BARAT, 1998-2000*

Fuji Titulanita, Siti Sumardiati, Mrr. Ratna Endang W.
Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Jember
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: ftitulanita@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang faktor- faktor penyebab, dampak, dan penyelesaian kerusuhan di pasar Glodok Jakarta Barat yang bertujuan dapat menjelaskan sebab- sebab terjadinya dan dampak kerusuhan di pasar Glodok. Penulisan ini menggunakan kerangka pendekatan psikologi sosial dengan mewawancarai para korban kerusuhan yang mengalami trauma menganggap peristiwa tersebut sangat menakutkan. Faktor nasional yaitu Krisis Moneter tahun 1998, mengakibatkan sembako naik dan menjadi langka dipasaran. Kepanikan, kesenjangan sosial ekonomi, dan prasangka buruk orang pribumi terhadap warga Tionghoa yang mayoritas pedagang terjadi di kalangan masyarakat. Faktor pendukung lain terjadi aksi demonstrasi mahasiswa Trisakti bersamaan dengan kerusuhan massa. Pada tanggal 14 Mei 1998 kerusuhan semakin meluas, hingga pasar Glodok dan *Orion Plaza* menjadi sasaran penrusakan, penjarahan, dan pembakaran. Dampak dari aksi kerusuhan ini adalah pedagang kehilangan harta benda, kios, dan pekerjaan. Penyelesaian terhadap kerusuhan ini menjelang pergantian presiden mengalami perbedaan. Pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie menerapkan kebijakan perbaikan pasar Glodok dan pembentukan TGPF untuk menemukan, mengungkap fakta, pelaku, dan latar belakang peristiwa kerusuhan Mei 1998, sedangkan Presiden Abdurrahman Wahid memberi kebebasan etnis Tionghoa dibidang sosial budaya, agama, dan politik yang kemudian berpengaruh terhadap perkembangan Glodok, seperti hadirnya tabloid Glodok Standart berbahasa Mandarin.

Kata Kunci: Krisis ekonomi, kerusuhan pasar Glodok, kebebasan Tionghoa

ABSTRACT

This article discusses the causal factors impact, and resolution of riot in the Glodok Market, West Jakarta. It aims to explain the causes and effects of violence in Glodok Market. This writing uses the framework of social psychology approach to in terview the riot victimswho considered the event as very frightening.The national factor was the Monetary Crisis in 1998 causing the rising prices of foodstuff. Monetary Crisis resulting in the price of nine essential commodities more increasingly and become scarce in the market. The panic, the socio economic disparity, and the prejudice indigenouse people toward Chinese merchants happening among the public. While other political factor was Trisakti student demonstrations simultaneously with the mass riots.On May 14, 1998 the riots escalated, Glodok Market and Orion Plaza were subjected to vandalism, looting, arson, and rape. The impact of was the loss of property owned by merchants, and employment. Glodok Market riot also had an impact on the national economy untill the reign of President B.J. Habibie implementing corrective policies and the establishment of TPGF to discover, uncover the facts, the perpetrator, and the background of the riots in May 1998. President Abdurahman Wahid gave a freedom tto Chinese in sociocultural, religion, and political aspect, which influenced the development of Glodok Market, such as the presence of Glodok Standard Tabloid in mandarin.

Key words : *Financial Crisis, Glodok Market riot, Deliberacy of Chinese*

1. Pendahuluan

Kerusuhan sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat multietnis, khususnya Indonesia yang memiliki keanekaragaman suku bangsa, bahasa, agama, ras dan adat istiadat. Pada saat pergantian orde kerusuhan akan muncul dimana ada struktur kekuasaan negara yang bertentangan dengan perkembangan ekonomi yang rapuh, didalamnya akan ada kekuatan politik. Artinya selalu terbuka skenario oleh siapapun atau kemungkinan untuk menciptakan kerusuhan sebagai manifestasi (gambaran) perlawanan terhadap struktur kekuasaan yang dominan, sementara tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat sangat memprihatinkan (Basuki Agus Suparno, 156). Seperti di Indonesia pada akhir tahun 1997, terjadi krisis moneter yang kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi, krisis politik dan bahkan telah berubah menjadi krisis multidimensi. Masyarakat mulai resah dan panik terhadap kelangkaan barang-barang kebutuhan, selain itu banyaknya pekerja di PHK sehingga menyebabkan jumlah pengangguran semakin meningkat. Kesenjangan sosial ekonomi di tengah kehidupan masyarakat semakin terasa, dimana mayoritas etnis Tionghoa terlihat eksklusif sedangkan masyarakat pribumi mengalami berbagai kesulitan ekonomi. Hal ini berpotensi adanya kerusuhan disaat ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat luar dan frustrasi akan keadaan hidup.

Pada saat aksi demonstrasi mahasiswa Universitas Trisakti berlangsung pada tanggal 12 Mei 1998 menuntut reformasi total di semua aspek politik, ekonomi dan pergantian presiden Soeharto. Peristiwa tersebut mengakibatkan empat mahasiswa Universitas Trisakti yaitu Hendrawan Sie, Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, dan Hery Hartanto menjadi korban disaat aksi demonstrasi berlangsung (Basuki Agus Suparno, 79). Keesokan harinya tanggal 13 Mei 1998, setelah pemakaman empat mahasiswa Trisakti gerakan reformasi mahasiswa kembali dilanjutkan tepatnya di seputar Universitas Trisakti. Bersamaan dengan aksi demonstrasi mahasiswa, muncul aksi keos yang dilakukan oleh massa. Mereka melumpuhkan sendi-sendi ekonomi negara dengan melakukan pengrusakan fasilitas umum, bahkan penjarahan dan pembakaran toko di seputaran Universitas Trisakti.

Menjelang tanggal 14 Mei 1998, kerusuhan mulai menyebar hampir ke seluruh

kawasan Jakarta. Pada waktu itu massa memanfaatkan keadaan dengan melakukan pengrusakan, penjarahan, dan pembakaran toko-toko, ruko secara serempak di sentra perdagangan yang mayoritas dikuasai oleh orang Tionghoa (Bian Poen, 17). Begitu juga yang terjadi di Pasar Glodok dan *Orion Plaza* dengan menjual alat-alat elektronik dan mayoritas pedagangnya adalah orang Tionghoa pada tanggal 14 Mei 1998 menjadi sasaran kerusuhan massa. Pada pukul 10.00 WIB terlihat dari Jalan Beos (sekitar Stasiun Kota) massa berkerumun dari berbagai arah dan bergerombol membagi kelompok menuju Mangga dua, Jembatan Lima dan sebagian menuju kearah pasar Glodok dan *Orion Plaza*. Penjual yang berada di toko dan ruko menganggap massa yang bergerombol ingin melakukan aksi demonstrasi, sehingga mereka tidak memiliki rasa curiga. Dengan spontan massa melakukan aksi melempari toko disepanjang Jalan Gajah Mada (Glodok) dengan batu, ada juga yang merusak dan mencoba masuk untuk menjarah barang-barang elektronik milik penjual (wawancara Amin). Polisi dan TNI mencoba untuk mengamankan massa, akan tetapi jumlah massa terlalu banyak sehingga aparat keamanan tidak mampu melerai aksi tersebut. Para pemilik toko dan pekerjanya mencoba untuk keluar dari Pasar Glodok, mereka tidak bisa menyelamatkan barang-barangnya, yang mereka pikirkan hanyalah selamat dari kepungan perusuh, sedangkan di Petak Sembilan selamat dari aksi kerusuhan.

Kerusuhan meluas hampir seluruh wilayah Jakarta, akhirnya dapat menjatuhkan rezim Soeharto sebagai presiden Indonesia. Pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto menyatakan berhenti menjadi presiden Indonesia dan B.J. Habibie menggantikan sebagai presiden ketiga di Indonesia. Berbagai permasalahan Indonesia telah diemban oleh pemerintahan B.J. Habibie yang meliputi perbaikan ekonomi Indonesia dengan memperbaiki sarana umum dan ekonomi, tuntutan dari Komnas HAM tentang penyelesaian kasus kerusuhan Mei 1998, dan permasalahan yang lainnya. Kemudian tuntutan tersebut menghasilkan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta untuk menyelidiki peristiwa kerusuhan Mei 1998 melalui keputusan Presiden No. 181/1998 (Aza dan Dewi Sri Utami, 16). Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh B.J.Habibie untuk menyelesaikan beban Indonesia, namun ketidakpercayaan MPR

(Mahkamah Perwakilan Rakyat) terhadap kekuasaannya dan tuntutan dari masyarakat tentang penyelesaian pelanggaran HAM, KKN, pengusutan kekayaan Soeharto, dan lepasnya Timor-Timor dari NKRI, menyebabkan legitimasi pemerintahan B.J. Habibie semakin melemah. Pada tanggal 20 Oktober 1999 B.J. Habibie menyatakan mengundurkan diri dari pencalonan presiden.

Pada tanggal 21 Oktober 1999, Abdurrahman Wahid terpilih menjadi presiden Indonesia. Pada masa pemerintahannya, dia sangat menaruh simpati terhadap etnis Tionghoa di Indonesia, dengan menawarkan konsep bangsa Indonesia yang pluralis dan menghimbau etnis Tionghoa baik WNI maupun WNA untuk bersama membangun Negara Indonesia. Dengan konsep bangsa Indonesia yang pluralis, diperlihatkan oleh presiden Abdurrahman Wahid dengan membatalkan keputusan mantan Presiden Soeharto Nomor 127/U/Kep/12/1966 tentang prosedur ganti nama bagi Warga Negara Indonesia yang memakai nama Tionghoa, Nomor 49/U/8/1967 tentang pendayagunaan media massa berbahasa Cina, dan Nomor 14 Tahun 1967, tentang larangan agama, kepercayaan, pendidikan, dan adat-istiadat Tionghoa hadir di Indonesia dengan mengeluarkan Kepres Abdurrahman Wahid Nomor 6/2000 yang memperbolehkan orang Tionghoa menjalankan segala bentuk ekspresi kebudayaan Tionghoa, agama, mempelajari bahasa Mandarin beserta aksaranya, dan terakhir perayaan Imlek dinyatakan sebagai hari libur nasional (Wibowo, 33,34,70). Konsep tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan etnis Tionghoa di Glodok yang meliputi sosial budaya, ekonomi, dan politik.

2. Rumusan Masalah

Masalah yang dibahas dalam artikel ini adalah: (1) Apakah faktor-faktor penyebab kerusuhan di pasar Glodok Jakarta Barat? (2) Apa dampak dan pengaruh yang ditimbulkan akibat kerusuhan tersebut? (3) Bagaimana penyelesaian kerusuhan di pasar Glodok Jakarta Barat?

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk menjelaskan sebab-sebab terjadinya kerusuhan pasar Glodok di Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat. (2) Untuk mengkaji berbagai dampak yang ditimbulkan kerusuhan massa di Pasar Glodok

Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat. (3) Untuk menjelaskan proses penyelesaian kerusuhan yang terjadi di Pasar Glodok.

4. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode sejarah karya Louis Goettschalk, yang mengungkapkan bahwa metode sejarah adalah proses dalam pengujian dan analisa secara kritis atas peristiwa di masa lalu (Gottschalk, 32) dengan melakukan tahapan-tahapan penelitian sebagai berikut.

Tahap pertama adalah Heuristik adalah usaha untuk mencari dan mengumpulkan sumber sejarah yang berkaitan dengan topik kajian yang akan menjadi bahan tulisan kita. Sumber sejarah yang digunakan meliputi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari pelaku atau saksi sejarah. Pengumpulan sumber primer tersebut dapat diperoleh menggunakan metode sejarah lisan, yang merupakan penggalan sumber sejarah melalui teknik wawancara.

Tahap kedua, Kritik sumber digunakan untuk melakukan kritik dan penelitian terhadap semua sumber sejarah yang diperoleh. Dalam metode sejarah ada dua macam kritik sumber, yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern diperlukan dalam rangka memastikan autentisitas (keaslian) sumber sejarah dan kritik intern diterapkan untuk menentukan kredibilitas (keterpercayaan) informasi yang disajikan.

Tahap ketiga, Interpretasi (verifikasi dan sintesis) yaitu kegiatan untuk mencari keterkaitan atau saling hubungan antara semua fakta yang ditemukan berdasarkan hubungan kronologis dan kausalitas (sebab-akibat) dengan melakukan imajinasi, interpretasi, dan teorisasi (analisis).

Tahap keempat, Historiografi yang merupakan tahapan terakhir dari metode sejarah, adalah upaya penulisan/rekonstruksi peristiwa dalam bentuk penulisan sejarah.

Adapun bentuk penulisan ini adalah deskriptif analitis yaitu penulisan sejarah yang berusaha menggambarkan dengan menguraikan peristiwa yang terjadi dalam bentuk hubungan sebab akibat yang mampu menjawab apa, siapa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana atau sering disebut 5W + 1H. Dalam penulisan ini menggunakan Metode deskriptif analitis, adalah memaparkan proses suatu peristiwa atau fenomena yang diteliti secara berurutan (kronologis) sejak awal hingga akhir.

Analitis digunakannya pendekatan atau kerangka teori dari ilmu-ilmu sosial, sehingga mampu mengungkapkan dan memaparkan kausalitas berbagai aspek yang terkait dengan peristiwa atau fenomena yang diteliti.

5. Hasil dan Pembahasan

a. Faktor Penyebab Kerusuhan Pasar Glodok

Terjadinya kerusuhan di pasar Glodok disebabkan karena faktor nasional, dimana pada tahun 1998 terjadi krisis moneter di Indonesia. Keadaan tersebut semakin diperparah oleh kepanikan para Investor secara mendadak mereka melakukan penjualan saham di Bursa Efek Jakarta untuk menghindari kerugian (Justin Suhandinata, 2). Gempuran tersebut mengakibatkan cadangan devisa yang ada tidak cukup dan dalam tempo singkat nilai rupiah semakin turun melampaui angka Rp 10.600,00.

DKI Jakarta terkena dampak paling besar, dengan ditutupnya sejumlah perusahaan seperti industri sepatu *Sport* yang dimiliki oleh Korea berniat memindahkan basis produksinya ke Thailand, sedangkan perusahaan modal asing Jepang yang meliputi *Sony*, *Sanyo*, *Toshiba*, dan *Sharp* sudah menghentikan operasinya, begitu juga dengan perusahaan-perusahaan asing yang lainnya (Suryawan, 17). Penghentian operasi tersebut berkembang menjadi permanen dengan penarikan modal yang sudah ditanam di Jakarta. Situasi tersebut berpengaruh pada pengurangan tenaga kerja atau PHK (Pemutusan Hak Kerja) dan pengangguran di Jakarta semakin meningkat. Bukan hanya itu, kenaikan BBM juga memperparah keadaan, naiknya sembilan bahan pokok (sembako) dipasaran menambah beban masyarakat (Justin Suhandinata, 3).

Di Glodok sendiri, Pada tanggal 5 Mei 1998, muncul isu rupiah akan naik mencapai Rp 12.000,00 per dolar AS. Mendengar isu tersebut masyarakat mulai panik, aksi borong barang-barang seperti sembako pada pusat-pusat perbelanjaan mulai terjadi. Mayoritas yang melakukan adalah orang-orang yang memiliki modal besar (pedagang), sedangkan masyarakat miskin hanya bisa membeli sesuai dengan keperluannya. Dampak aksi borong tersebut menyebabkan bahan-bahan sembako semakin langka dipasaran. Beberapa pedagang memanfaatkan keadaan tersebut dengan menimbun sembako dan menjualnya pada saat harga-harga mulai bertambah naik guna mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Menanggapi

keadaan tersebut, muncul prasangka-prasangka dari kalangan masyarakat pribumi kepada orang Tionghoa yang sebagian besar bekerja sebagai pedagang. Orang Tionghoa dituduh sebagai “tukang timbun”, hanya cari untung, dan tidak memperdulikan keadaan masyarakat miskin”. Prasangka ini kemudian berkembang menjadi ketidak sukaan golongan pribumi terhadap etnis Tionghoa yang posisinya mayoritas sebagai pedagang.

Politik nasional juga menjadi faktor pendukung terjadinya kerusuhan di pasar Glodok. Pada tanggal 13 Mei 1998 setelah pemakaman empat mahasiswa Trisakti, mahasiswa dari berbagai kampus bergabung melakukan aksi mimbar besar di halaman kampus Trisakti sedangkan di luar kampus terlihat massa masyarakat dari berbagai sudut seperti LSM, Ormas, dan Buruh serempak mulai berdatangan dan berkumpul tanpa direncanakan oleh mahasiswa. Pada pukul 13.00 WIB, massa mulai melakukan pengrusakan sejumlah fasilitas umum seperti lampu merah, tiang lampu, dan sebagainya. Kemudian tindakan massa mulai brutal dengan membuat keributan seperti membakar truk sampah yang berdekatan dengan pos Polisi Grogol dan SPBU (pengisian bensin) bensin sehingga menimbulkan kebakaran. Pada pukul 16.00 WIB, keributan tersebut berubah menjadi gerakan anti Tionghoa dengan merusak, menjarah, dan membakar disepanjang jalan komplek pertokoan di sekitar Trisakti sehingga mengakibatkan banyaknya korban jiwa (Ester Indahyani Jusuf, 123-124). Keesokan hari pada tanggal 14 Mei 1998 aksi kerusuhan massa semakin meluas di seluruh DKI Jakarta khususnya pusa-pusat perekonomian (Justin Suhandinata, 55). Sedangkan di Glodok muncul isu bahwa akan terjadi kerusuhan, target utama adalah pasar Glodok dan *Orion Plaza*. Isu tersebut menyebar dengan cepat di kalangan masyarakat seperti buruh, supir angkot, tukang parkir dan sebagainya, sedangkan kalangan etnis Tionghoa sebagian besar tidak mendengar isu tersebut (isu kerusuhan), sedangkan kalangan masyarakat pribumi cenderung tidak memberi tahu.

Terlihat bahwa antara etnis Tionghoa dengan masyarakat priburibumi tidak terjalin komunikasi sosial dengan baik, selain itu perilaku orang Tionghoa yang selalu mementingkan keuntungan ekonomi menambah kebencian orang pribumi, sehingga pada saat terjadi gejolak

politik, sosial, dan ekonomi, mereka dijadikan objek sasaran tindakan kekerasan dari kelompok pribumi untuk meluapkan rasa ketidakpuasan baik terhadap pemerintah atau lingkungannya.

b. Kronologi Kerusuhan di Pasar Glodok

Pada tanggal 14 Mei 1998, tingkat kerusuhan di DKI Jakarta meluas dan bersekala besar dengan runtutan waktu hampir bersamaan sehingga nampak terorganisir. Meskipun isu “anit Tionghoa” masih menjadi pemicu kerusuhan, namun massa cenderung memanfaatkan keadaan dengan melakukan pengrusakan, penjarahan, dan pembakaran disejumlah pertokoan.

Seperti yang terjadi di Glodok tanggal 14 Mei 1998, massa mulai mendatangi Pasar Glodok dan *Orion Plaza* serempak melakukan pengrusakan, penjarahan, dan pembakaran. Sebelum terjadi kerusuhan di pasar Glodok, pihak PD. Pasar Jaya tidak mengkhawatirkan kawasan pasar Glodok dan Orion Plaza akan diserbu massa karena tempat tersebut jauh dari pusat kerusuhan (seputaran kampus Trisakti), sehingga tempat tersebut tetap melakukan kegiatan perekonomiannya seperti biasa meskipun di wilayah sekitar Trisakti terjadi kerusuhan.

Sekitar pukul 10.00 WIB, dari Jalan Beos (sekitar Stasiun Kota) massa berkerumun dari berbagai arah. Kemudian massa merusak fasilitas umum seperti pot-pot, pagar di sepanjang jalan, dan lampu merah, kemudian mereka melakukan pelemparan batu ke arah pertokoan disepanjang jalan raya. Pengelola pasar elektronik (pasar Glodok dan *Orion Plaza* Glodok) merasa khawatir melihat keadaan tersebut sehingga memerintahkan penjaga keamanan (satpam) agar para pedagang segera menutup semua toko dan pergi menyelamatkan diri melewati parkir mobil yang letaknya berada di lantai tujuh dekat dengan kantor pasar Glodok, sedangkan di luar Glodok toko-toko lain bergegas menutup tempat dagangannya dan pedagang kaki lima mengemasi barang dagangan kemudian segera pergi meninggalkan lapak yang ditempatinya, ada juga yang melihat-lihat suasana keramaian. Serempak massa menyerang pasar Glodok dan *Orion Plaza* dengan lemparan batu dan mencoba masuk ke dalam toko. Mereka menjarah sejumlah alat-alat elektronik yang ada di dalam toko.

Tiba-tiba *Orion Plaza* terbakar dan menghanguskan gedung yang terbagi menjadi dua (pasar Glodok dan Orion Plaza Glodok).

Melihat hal tersebut, aparat keamanan (polisi) mulai membubarkan kerumunan perusuh dengan mengeluarkan beberapa tembakan dan mengejar para penjarah, akan tetapi dengan banyaknya jumlah penjarah polisi merasa kualahan untuk menghentikannya. Kerusuhan di Glodok seperti perang, dimana penembakan selalu terdengar. Bukan hanya pasar Glodok dan *Orion Plaza* yang menjadi sasaran kerusuhan massa, akan tetapi toko-toko yang berada di pinggir jalan raya juga menjadi sasaran penjarahan. Seperti toko “Maju” di Jalan Pancoran Glodok milik Ibu Yanti Ningsih (Yien Tie) yang melayani penjualan air isi ulang dan peralatan dapur menjadi sasaran aksi penjarahan massa. Hanya Petak Sembilan (pemukiman warga dan pasar tradisional) yang selamat dari kerusuhan. Menjelang sore hari, tersiar isu teror bahwa massa akan menyerbu pemukiman Petak Sembilan yang kebanyakan dihuni oleh etnis Tionghoa dan masyarakat pribumi. Mendengar hal tersebut, masyarakat Glodok panik menyewa aparat polisi dengan membayar sejumlah uang sebesar Rp 2.000.000,00 untuk satu orang guna mengamankan pemukiman atau ruko mereka, sedangkan dari pihak Kelurahan Glodok mengantisipasi melakukan pengamanan dengan ronda bersama untuk mengusir massa yang ingin berbuat rusuh.

c. Dampak Kerusuhan di Pasar Glodok

Meski pun di Pasar Glodok dan *Orion Plaza* tidak diketemukan korban meninggal dunia akibat kerusuhan, akan tetapi para pedagang yang mayoritas etnis Tionghoa mengalami trauma yang mendalam akibat peristiwa tersebut. Sedangkan yang nampak adalah kerugian material berupa bangunan, seperti toko, Swalayan, dan rumah yang dirusak termasuk harta benda berupa mobil, sepeda motor, barang dagangan dan lainnya yang dijarah atau dibakar massa. Di pasar Glodok dan *Orion Plaza* menampung banyak para pedagang etnis Tionghoa sebanyak 600 kios. Sekitar 297 kios di pasar Glodok rusak dan barang dagangan dijarah oleh massa, sedangkan *Orion Plaza* hampir semua kios rusak akibat terbakar. Bagi para pedagang kaki lima atau orang pribumi yang berada di sekitar Glodok sangat sulit untuk diwawancarai atau dimintai keterangan mengenai kerusuhan Mei 1998, sehingga tidak mendapatkan keterangan secara detail tentang dampak kerusuhan bagi masyarakat pribumi. Mereka (pedagang pribumi) cenderung

bungkam dikarenakan pelaku kerusuhan sebagian besar adalah orang pribumi sehingga mereka tidak ingin terlibat.

Korban kehilangan pekerjaan dikarenakan gedung-gedung atau tempat kerjanya dirusak, dijajah, dan dibakar mengakibatkan kehilangan pekerjaan. Biasanya paling banyak kehilangan pekerjaan yang bekerja di pasar Glodok dan *Orion Plaza* adalah anggota masyarakat biasa yang bekerja sebagai pramusaji (pelayan toko) dan sebagainya, sedangkan korban hilang tercatat 1 orang yaitu Hendra Hambali (Seri Dokumen Kunci TGPF, 20).

d. Kebijakan B.J Habibie Terhadap etnis Tionghoa

Pada hari Kamis tanggal 21 Mei 1998 adalah peristiwa bersejarah bagi negara Indonesia, dimana Soeharto menyatakan mengundurkan diri sebagai presiden bersamaan dengan dilantikannya B.J. Habibie sebagai presiden Republik Indonesia. Lengsernya Soeharto dan naiknya B.J. Habibie sebagai presiden masih mengundang perdebatan pro-kontra dikalangan elit politik, akan tetapi sesuai Pasal 8 UUD (Undang-Undang Dasar) 1945 yang berbunyi: apabila presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan, ia diganti oleh wakil presiden sampai habis waktunya, sehingga naiknya B.J. Habibie sebagai presiden Republik Indonesia sah dan tidak melanggar konstitusi (Ade Alwawi).

Presiden B.J. Habibie mengemban permasalahan ekonomi DKI Jakarta yang lumpuh dengan melakukan perbaikan pasar, pertokoan, dan sebagainya agar aktifitas perekonomian kembali berlangsung atau hidup kembali. Pada tanggal 5 Juni 1998 Presiden B.J. Habibie melakukan peninjauan di sejumlah pasar besar seperti pasar Minggu, Pasar Cipete, pasar Palmerah, dan pasar Glodok. Di Glodok B.J. Habibie melakukan dialog kepada para pedagang yang menjadi korban kerusuhan dengan menjanjikan bahwa pemerintah akan segera melakukan perbaikan pasar Glodok dan *Orion Plaza* agar pedagang yang menjadi korban kerusuhan massa dapat segera melakukan kegiatan perniagaan. Terdapat dua tahap penggarapan gedung tersebut yaitu pada bulan Februari 1999 tahap pertama merobohkan gedung-gedung yang rusak dan terbakar sehingga membutuhkan dua bulan masa penggarapan, tahap kedua dilanjutkan bulan April 1999 dengan

merehabilitasi atau renovasi gedung, sebanyak 25 milyar dikeluarkan oleh pemerintah untuk perbaikan pasar Glodok dan Orion Plaza yang rusak akibat kerusuhan massa. Pada bulan September 1999 pasar Glodok dan Orion Plaza selesai direnovasi sehingga dapat ditempati oleh para pedagang untuk berniaga kembali (Aza dan Dewi Sri Utami, 73).

Selain itu tuntutan dari berbagai lembaga seperti Komnas Perempuan, Komnas Hak Asasi Manusia (HAM), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Tim Relawan dan organisasi kemasyarakatan lainnya melakukan aksi demonstrasi di bundaran Indonesia Jakarta Pusat menuntut Presiden B.J Habibie segera menindaklanjuti kerusuhan Mei 1998 yang terjadi di DKI Jakarta. Pada tanggal 15 Juli 1998 Presiden B.J. Habibie menyetujui pertemuan tersebut dan menghasilkan pembentukan Tim Gabungan Pencarian Fakta (TGPF) untuk menemukan, mengungkap fakta, pelaku dan latar belakang peristiwa kerusuhan Mei 1998 (Publikasi Komnas Perempuan, 13). Dari hasil laporan penyelidikan TGPF pola kerusuhan tanggal 14 Mei 1998 di Glodok Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat adalah kelompok solid (kompak atau bersama-sama) dalam jumlah cukup banyak (100) dan sudah memiliki sasaran-sasaran pada lokasi tertentu. Kelompok ini mengajak massa dengan melakukan perusakan, penjarahan dan pembakaran terlebih dahulu. Selama melakukan keributan mereka terpisah dari penduduk sekitar, umumnya hanya menonton kemudian ikut-ikutan. Selain itu mereka terlihat telah membekali diri dengan berbagai alat perusak seperti linggis, kampak, kayu, besi, dan sejenisnya. Kelompok ini juga bergerak atau berpindah-pindah di suatu lokasi yang berdekatan dalam waktu bersamaan. Ada keterlibatan para anggota preman (anak berandalan) memanfaatkan keadaan DKI Jakarta yang sedang tidank aman dengan memprovokatori massa untuk ikut melakukan pengrusakan, menjarah, dan membakar pertokoan di kawasan Glodok.

Adanya keterangan diatas, maka TGPF menyimpulkan bahwa para pelaku kerusuhan tanggal 13-15 Mei 1998 terdiri dari tiga golongan yaitu :

1. Kelompok Provokator

Kelompok ini yang menggerakkan massa dengan memancing keributan, memberikan tanda-tanda tertentu pada sasaran, melakukan

pengrusakan awal, pembakaran, dan penjarahan. Provokator ini umumnya bukan dari wilayah setempat, dalam kelompok kecil (lebih kurang belasan orang), menggunakan sarana transportasi (jeep), dan sarana komunikasi (HT atau HP). Kelompok ini secara fisik tampak terlatih dan juga yang menyiapkan sejumlah alat-alat perusak seperti dongkrak, batu, kendaraan, linggis, cairan pembakar dan sebagainya.

2. Massa Aktif

Massa aktif ini datang dalam jumlah puluhan hingga ratusan, mulanya mereka adalah massa pasif pendatang yang sudah terprovokasi sehingga menjadi agresif dengan melakukan pengrusakan lebih luas termasuk pembakaran. Massa ini juga melakukan penjarahan pada toko, ruko, dan rumah. Mereka bergerak secara terorganisir.

3. Massa Pasif

Massa Pasif ini adalah warga lokal (asli di tempat kerusuhan) berkumpul untuk menonton dan ingin tahu apa yang akan terjadi. Sebagian dari mereka ikut-ikutan merusak dan menjarah setelah dimulainya kerusuhan, tetapi tidak sedikit pula yang hanya menonton sampai akhir kerusuhan, terkadang mereka sebagian menjadi korban kebakaran.

TGPF juga menyatakan telah terjadi kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan terhadap sejumlah perempuan dalam peristiwa kerusuhan tanggal 13-15 Mei 1998. Berdasarkan fakta yang diketemukan dan info dari saksi-saksi ahli, tindakan kekerasan seksual terjadi secara spontan diberbagai tempat yang berbeda dalam waktu hampir bersamaan, selain itu situasinya sangat mendukung untuk terjadi kekerasan seksual terhap perempuan. Korban adalah penduduk Indonesia dengan berbagai latar belakang, diantaranya kebanyakan adalah etnis Tionghoa. Belum dipastikan bahwa kekerasan seksual yang terjadi pada saat kerusuhan Mei 1998 di Glodok merupakan kegiatan terencana dan tidak ditemukan fakta adanya aspek agama dalam kasus kekerasan seksual (Seri Dokumen Kunci TGPF, 17-18).

Dari pihak kepolisian sendiri, dalam pembuatan berkas proses pengajuan kasus pelaku kerusuhan yang ditangkap untuk dipersidangkan mengalami kesulitan, karena mereka yang ditangkap sebanyak 50 orang sehingga tidak

semua dapat diadili. Untuk proses lebih lanjut, Kepolisian Daerah Metro Jaya mengirim kasus tersebut pada Kejaksaan Tinggi dengan proses terdakwa akan disatukan dalam satu berkas sehingga memenuhi ruang sidang. Pada tanggal 25 Mei 1998 persidangan berlangsung, pelaku dijerat KUHP pasal 363 dan 406 dengan dakwaan pengambilan hak orang lain (pencurian) disertai pengrusakan. Namun pihak kepolisian dalam proses penyelidikan pelaku utama kerusuhan dihentikan begitu saja, karena terlalu banyak massa yang melakukan penjarahan (Victoria Sidjabat, dkk, 68).

Untuk mewujudkan negara demokrasi, di gedung Bina Graha Jakarta Pusat pada tanggal 29 Mei 1998 Presiden B.J. Habibie menyampaikan bahwa pemerintah tidak membatasi pembentukan partai, namun harus berasaskan Pancasila dan UUD 1945, dan tidak boleh ada unsur SARA. Pernyataan tersebut disaksikan oleh Ketua Ulama Majelis Indonesia (MUI) KH Hasan Basri, serta para pengurus MUI pusat dan daerah, pimpinan ormas Islam tingkat pusat, dan wakil ulama dari berbagai daerah (CakNur,12). Berkaitan dengan Glodok, THHK (Tiong Hoa Hwee Koan) adalah perkumpulan berdasarkan alumni sekolah Tionghoa berkembang menjadi organisasi yaitu perkumpulan alumni Tionghoa yang letaknya berada di Glodok Plaza untuk membahas tentang ekonomi. Selain itu muncul organisasi baru yaitu SIMPATIK untuk memperingati kerusuhan Mei 1998 di Jakarta. Pada bulan Maret 1999 SIMPATIK melakukan aksi *long march* sebanyak 20 massa dimulai dari SMAN 19 Glodok menuju reruntuhan bangunan pasar Glodok bekas kerusuhan Mei 1998. Mereka memperingati 1 tahun peristiwa kerusuhan Mei 1998 dengan menyuarakan tuntutan agar pemerintah segera menghapus Impres No 14 Tahun 1967, karena TGPF yang dibentuk untuk menyelesaikan kerusuhan Mei 1998 masih belum sepenuhnya terselesaikan (Tika).

Legitimasi B.J. Habibie semakin lemah, karena pemerintahan transisi, warisan pemerintahan Soeharto dan bukan dipilih oleh rakyat. Selain itu lepasnya Timor-Timor dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang bertentangan dengan kesepakatan MPR, mengakibatkan muncul tuntutan dari dunia Internasional tentang pelanggaran HAM yang meminta pertanggung jawaban militer Indonesia. Pada tanggal 14 Oktober 1999, Presiden B.J. Habibie menyampaikan pidato pernyataan

pertanggung jawaban di depan sidang, pernyataan tersebut menimbulkan penolakan-penolakan dari kalangan Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi PKB, Fraksi Kesatuan Bangsa Indonesia, Fraksi Demokrasi Kasih Bangsa, sejumlah mahasiswa dan masyarakat. Pada tanggal 20 Oktober 1999, ketua MPR Amien Rais menyatakan bahwa pertanggung jawaban Presiden B.J. Habibie tentang pelanggaran HAM di Timor-Timor ditolak, dan hari yang sama Presiden B.J. Habibie menyatakan mengundurkan diri dari pencalonan presiden.

e. Kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid Terhadap etnis Tionghoa

Hasil dari pemilihan umum muncul dua partai terkuat sebagai calon presiden yaitu Megawati dari PDI-Perjuangan dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dari PKB (Partai Kebangkitan Bangsa). Pada pemilihan umum, PDI-Perjuangan meraih kemenangan sebesar 33% suara sedangkan PKB mendapatkan 12% suara. Namun pada tanggal 7 Oktober 1999 dalam sidang umum, ketua MPR Amien Rais menggunakan peraturan poros tengah dimana partai-partai muslim seperti PPP dan PAN berkoalisi dengan PKB sehingga PDI-Perjuangan tidak memiliki kursi penuh dan mulai membentuk aliansi dengan PKB. Pada tanggal 20 Oktober 1999 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) resmi menjadi presiden Republik Indonesia keempat dan dilantik dengan Ketetapan MPR No. VII/MPR/1999 untuk masa bakti 1999-2004, sedangkan Megawati terpilih menjadi Wakil Presiden RI dengan Ketetapan MPR No. VIII/MPR/1999 (Beny G Setiono).

Presiden Abdurrahman Wahid sangat menaruh simpati terhadap etnis Tionghoa di Indonesia yang selalu menjadi koerban aksi kerusuhan seperti di Tangerang, Bekasi, Solo, Surabaya, Situbondo, dan DKI Jakarta sehingga Presiden Abdurrahman Wahid menawarkan sejumlah konsep bangsa Indonesia yang pluralis dan menghimbau etnis Tionghoa baik WNI maupun WNA untuk bersama membangun negara Indonesia (Wibowo, 33).

Konsep bangsa Indonesia yang pluralis diperlihatkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid dengan membatalkan keputusan mantan Presiden Soeharto Nomor 127/U/Kep/12/1966 tentang prosedur ganti nama bagi Warga Negara Indonesia yang memakai nama Tionghoa, Nomor 49/U/8/1967 pendayagunaan media massa

berbahasa Cina, dan Nomor 14 Tahun 1967 larangan agama, kepercayaan, pendidikan, dan adat-istiadat Tionghoa hadir di Indonesia dengan mengeluarkan Kepres Abdurrahman Wahid Nomor 6/2000 yang memperbolehkan orang Tionghoa menjalankan segala bentuk ekspresi kebudayaan Tionghoa, agama, mempelajari bahasa Mandarin beserta aksaranya, dan terakhir perayaan Imlek dinyatakan sebagai hari libur nasional (Wibowo, 33-34-170).

Berkaitan dengan pasar Glodok, muncul peredaran sebuah tabloid Glodok Standart berbahasa Mandarin yang diterbitkan oleh PT Merdeka Cakrawala dibawah penerbitan Grup Jawa Pos memuat berita lokal sekaligus iklan disepertaran pusat bisnis di kawasan Glodok yang menjadikan kawasan ini sebagai pusat grosir yang terkenal sehingga kebudayaan Tionghoa juga ikut dikenalkan pada masyarakat umum (Wibowo, 173) Di Glodok mempunyai 1 tempat kursus bahasa Mandarin letaknya berada di Jalan Patekoan SMAN 19 Glodok Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat. Tentang tradisi dan kebudayaan etnis Tionghoa, pada tanggal 16 Februari 2000 Glodok melakukan perayaan Imlek secara terbuka di Wihara Dharma Bakti. Dengan menampilkan berbagai budaya etnis Tionghoa yang berkaitan dengan warna merah (warna keberuntungan), berbagai lampion bertuliskan huruf Cina, makanan dan pernak-pernik yang berciri khas Tionghoa di jajakan di pasar Petak Sembilan.

6. Kesimpulan

Kerusuhan pasar Glodok Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat disebabkan oleh dua faktor nasional yaitu Krisis Moneter tahun 1998 di Indonesia, yang mengakibatkan harga sembilan bahan pokok semakin naik dan menjadi langka dipasaran. Keadaan tersebut membuat panik masyarakat Jakarta, kesenjangan sosial ekonomi antara kaya dan miskin semakin terasa dikalangan masyarakat, sehingga muncul berbagai prasangka buruk sejumlah masyarakat pribumi terhadap warga Tionghoa yang mayoritas sebagai pedagang. Faktor politik nasional juga sebagai pendukung terjadinya kerusuhan di pasar Glodok, dimana pada tanggal 13 Mei 1998 aksi demonstrasi mahasiswa Trisakti menuntut perbaikan perekonomian Indonesia dan Soeharto turun menjadi presiden sehingga memancing massa lain ikut turun kejalan dan melakukan keributan. Peristiwa tersebut kemudian berubah

menjadi gerakan anti Tionghoa dengan melakukan pengrusakan, penjarahan, dan pembakaran pertokoan, kendaraan, dan bangunan lain yang mayoritas milik etnis Tionghoa.

Pada tanggal 14 Mei 1998 kerusuhan massa semakin meluas di DKI Jakarta. Para preman memanfaatkan keadaan tersebut hingga menyebabkan pasar Glodok dan *Orion Plaza* menjadi sasaran penrusak, penjarah, dan dibakar oleh massa. Meskipun tidak diketemukan korban meninggal di pasar Glodok dan *Orion Plaza*, akan tetapi pedagang Glodok mengalami trauma yang sangat mendalam, hal itu dikarenakan kerusuhan massa di pasar Glodok digambarkan seperti perang. Namun dampak yang terlihat adalah kerugian material mayoritas diderita oleh pedagang etnis Tionghoa yang kehilangan harta benda dan tempat berdagang, sedangkan korban kehilangan pekerjaan kebanyakan diderita oleh orang pribumi yang tempat kerjanya rusak dan dibakar oleh massa sehingga mereka mencari tempat atau pekerjaan lain, sebagai contoh para pramusaji yang bekerja di pasar Glodok dan *Orion Plaza*.

Penyelesaian terhadap kerusuhan pasar Glodok menjelang pergantian presiden mengalami perbedaan. Pada masa pemerintahan B.J Habibie tanggal 21 Mei 1998 melakukan kebijakan dengan perbaikan pasar Glodok dan *Orion Plaza*. Menyangkut tuntutan Komnas HAM mengenai penyelesaian kerusuhan Mei 1998, Presiden Habibie membentuk TGPF untuk menemukan, mengungkap fakta, pelaku, dan latar belakang peristiwa kerusuhan Mei 1998, sedangkan masa pemerintahan Abdurrahman Wahid tanggal 20 Oktober 1999 menerapkan konsep bangsa yang pluralis. Konsep tersebut diperlihatkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid dengan menaruh simpati terhadap masyarakat Tionghoa di Indonesia yang selalu didiskriminasi dan menjadi korban kerusuhan. Menanggapi hal tersebut Presiden Abdurrahman Wahid segera merespon dengan membatalkan keputusan mantan presiden Soeharto Nomor 127/U/Kep/12/1966 prosedur ganti nama bagi Warga Negara Indonesia yang memakai nama Tionghoa, Nomor 49/U/8/1967 pendayagunaan media massa berbahasa Cina, dan Nomor 14 Tahun 1967 larangan agama, kepercayaan, pendidikan, dan adat-istiadat Tionghoa hadir di Indonesia dengan mengeluarkan Kepres Abdurrahman Wahid Nomor 6/2000 yang memperbolehkan orang Tionghoa menjalankan

segala bentuk ekspresi kebudayaan Tionghoa, agama, mempelajari bahasa Mandarin beserta aksaranya, dan terakhir perayaan Imlek dinyatakan sebagai hari libur nasional.

Berkaitan dengan pasar Glodok, kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid muncu media baru khususnya tabloid Glodok Standart berbahasa Mandarin yang berpengaruh terhadap perkembangan pasar Glodok. Namun kebijakan diatas tidak begitu saja dapat menyelesaikan kerusuhan Mei 1998. Berdasarkan uraian-uraian peristiwa yang telah dijelaskan pada bab-bab selanjutnya dapat disimpulkan bahwa:

Lambannya penanganan dari aparat keamanan menangani dan menanggapi rangkayan peristiwa kerusuhan Mei 1998, mengakibatkan kerusuhan massa meluas.

Pemerintah bertanggung jawab untuk menuntaskan segala bentuk premanisme yang berkembang disemua lingkungan masyarakat.

Orang Tionghoa kurang menjalin komunikasi budaya dan membaaur dengan masyarakat pribumi sehingga prasangka-prasangka etnis terus berkembang kemudian dapat membahayakan keselamatan etnis Tionghoa.

Sikap pemerintah yang memberi kemudahan orang Tionghoa berkembang di bidang perekonomian, seperti di Kelurahan Glodok mayoritas pedagang Tionghoa menempati tempat strategis dan layak untuk berdagang, sebagai contoh Pasar Glodok dan *Orion Plaza* adalah tempat perniagaan mayoritas dikuasai oleh pedagang Tionghoa. Sikap tersebut mengakibatkan kecemburuan sosial masyarakat pribumi.

Pemerintah harus memberikan rehabilitasi, kopensasi, dan membantu pembangunan kembali pertokoan milik korban kerusuhan.

Pemerintah perlu memudahkan korban untuk mengurus surat-surat berharga milik korban kerusuhan.

Daftar pustaka

Buku

- Benny G. Setiono. 1999. *Tionghoa Dalam Pusaran Politi*. Jakarta: ELKASA.
- Bian Poen dkk. 2004. *Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta Peristiwa Kerusuhan Mei 1998*. Jakarta : Publikasi Komnas Perempuan.

- Bonnie Triyana. 2011. *Eddie Lembong, Mencintai Tanah Air Sepenuh Hati*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Carla dkk. 2003. *Tragedi Mei 1998, Dalam Perjalanan Bangsa*. Jakarta: Publikasi Komnas Perempuan.
- Ester Indahyani Jusuf. 2007. *Kerusuhan Mei 1998, Fakta, Data, dan Analisa*. Jakarta : Solidaritas Nusa Bangsa dan Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia.
- Justin Suhandinata. 2009. *WNI Keturunan Tionghoa, Dalam Stabilitas Ekonomi dan Politik Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.
- Kuntowijoyo. 1994. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta : PT Tiara Wacana Yogya.
- Goettschlak Louis. 1980. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press.
- Sartono Kartodirjo. 1993. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Redding Gordon.1994. *Jiwa Kapitalisme Cina*. Jakarta: Abdi Tandur.
- Siswono Yudo Husodo. 1985. *Warga Baru, Kasus Cina di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Padamu Negeri.
- Wibowo dan Tung Ju Lan. 2010. *Setelah Air Mata Kering*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Surat Kabar dan Majalah**
- Aksi Peristiwa*. “Ekonomi Indonesia Tengah Mimpi Buruk, Edisi Khusus tahun 66”, 21 Mei 1998.
- Aksi Peristiwa*. “Ekonomi Kalang Kabut”, 19-25 Mei 1998.
- Forum Keadilan*. “Laporan Langsung Dari Cendana”, 29 Juni 1998.
- Gatra*. “Huru-Hara Jakarta”, Suaram Setelah Amuk Masa, 23 Mei 1998.
- Gatra*. “Tim-Tim Mengungkap Sipil Berbedil”, Buntut Mahal Janji Habibie, 13 Februari 1999.
- Kompas*. “Jakarta Dibersihkan dari Sampah Sisa Kerusakan”, 17 Mei 1998.
- Kompas*. “Siapa Saja Boleh Bentuk Partai”, 19 Mei 1998.
- Media Indonesia*. “Pro-Kontra Habibie”, Debat Setelah Lengser Keprabon, 24 Mei 1998.
- Wawancara**
- Amin, Pasar Glodok, 8-1-2013
 Damar, Glodok, 7-1-2013
 Yanti, Glodok, 11-2-2013
 Johan, Glodok, 8-1-2013
 Sumarni, Glodok, 11-2-2013
 Heriyanto, Petak Sembilan, 11-2-2013
 Madin, Pinangasia, 15-2-2013
 Edwerd atau Edo, 15-2-2013
 Alexander Yeris, Pasar Jaya, 10-1-2013
- Internet**
- Afiranto Budi, *Definisi Kerusakan, Pemogokan, Akibat Perbuatan Jahat* [online]<http://www.akademisuransi.org/2012/10/definiskerusuhanpemogokanakibat.html>, diunduh pada 19 Desember 2013.
- Lepi T. Tarmidi, *Krisis Moneter Indonesia*, [online]<http://almareza-almareza.blogspot.com/2010/10/krisis-ekonomi-1997-1998-indonesia.html>, diunduh pada 28 Mei 2014.
- Tika, *Kawasan Pecinan Glodok dibalik Lensaku*, [online]
<http://wisata.kompasiana.com/jalan-jalan/2013/02/13/kawasan-pecinan-glodok-di-balik-lensaku-533074.html>, diunduh pada 12 April 2014.
- E. Korel Dewanto, *Organisasi SIMPATIK di GLODOK*, [online] dalam <http://www.Tempo.Co/read/news/2001/05/13/0...> diunduh 12 April 2014